

UPAYA TURKI DALAM MENGHADAPI TARIF IMPOR BAJA DAN ALUMINIUM AMERIKA SERIKAT TAHUN 2018-2021

Fhara's Imas Trada¹

Abstract: *The US steel and aluminum industries play an important role in contributing to the nation's finances. The US Department of Commerce found that steel and aluminum exceeded US import capacity. To maintain the security of the steel industry President Trump implemented a protectionism policy in the form of an ad valorem tariff on 25% steel imports and 10% aluminum under the authority of article 232 of the 2018 trade act which was implemented on March 23, 2018. This policy is fully implemented for steel and steel exports. country aluminum to the US. The US imposed additional tariffs on steel of up to 50% and aluminum of up to 20% against Turkey. The implementation of steel and aluminum import tariffs had an impact on the Turkish economy, thereby reducing steel and aluminum exports to the US. Based on these actions, the contents of the research are to describe Turkey's efforts in submitting steel and aluminum import tariffs to the DSB at the WTO. This effort aims to avoid a greater impact and reduce losses. Then, Türkiye implemented retaliatory measures in the form of tariffs on US agricultural and food products.*

Keywords: *DSB, Import Duty Tariff, Turkey, United States of America, Steel and Aluminum Import Tariff*

Pendahuluan

Industri baja dan aluminium Amerika Serikat berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap keuangan negara. Kontribusi ini terdiri dari pajak langsung yang dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan, setara dengan total pendapatan \$56 miliar kepada pemerintah federal, negara bagian dan lokal (AIS, 2018).

Pada bulan April 2017, Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross, merilis laporan investigasi Departemen Perdagangan AS, yang menemukan bahwa volume dan kondisi impor baja dan aluminium melebihi kapasitas impor AS sebesar 700 juta ton pada tahun 2018, untuk maksimal konsumsi hingga 100 juta ton per tahun (U.S. Department of Commerce, 2018). Mengakibatkan produksi baja dan aluminium AS mengalami kerugian.

Untuk menjaga keamanan industri baja, akhirnya Trump mengambil langkah untuk menerapkan Kebijakan Proteksionis berupa *ad valorem tariff* impor produk baja 25% dan aluminium 10%. Kebijakan yang tertuang dalam *authority section 232 trade actions in 2018* mulai diterapkan tanggal 23 Maret 2018 (Congressional Research Service, 2021). Tarif diberikan secara global atau menyeluruh ke semua negara yang mengeksport produk baja dan aluminium ke AS.

Presiden Trump menegaskan bahwa produk baja dan aluminium merupakan komoditi yang penting bagi perekonomian AS sehingga untuk mengoptimalkan perekonomian, Trump berusaha untuk menstabilkan perekonomian dalam negeri,

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : fharasimastrada08@gmail.com

disebabkan produk baja dan aluminium juga sangat mendukung dalam industri pertahanan AS.

Trump mengambil langkah-langkah untuk melindungi keamanan nasional AS, khususnya ekspor produk baja dan aluminium yang terkena dampak dari baja murah Tiongkok di pasar dunia. Tindakan tersebut cukup berpengaruh bagi negara dengan ekonomi yang penghasilannya mengandalkan produk baja dan aluminium sebagai penunjang ekonomi negara.

Kebijakan tersebut berdampak pada negara-negara pengekspor produk baja dan aluminium ke pasar AS salah satunya Turki. Tarif impor produk baja dan aluminium yang diberlakukan AS merugikan Turki dikarenakan AS merupakan tujuan pasar keempat terbesar ekspor produk baja dan aluminium Turki dari tahun 2018. Turki merupakan eksportir keenam terbesar ke pasar domestik AS dari tahun 2017 sampai 2018.

Pasca terkena tarif impor baja dan aluminium, eksportir baja Turki ke AS turun 76% pada tahun 2018 hingga 2019 setelah turun 38% pada tahun 2017 hingga 2018. Penurunan ekspor baja ke Amerika Serikat berdampak pada tingkat eksportir Turki yang menempati urutan ke-19 di tahun 2019.

Presiden Trump kembali menaikkan tarif impor produk baja Turki dari 25% menjadi 50%, dan aluminium 10% menjadi 20% pada tanggal 10 Agustus 2018. Dalam hal ini negara yang paling dirugikan yaitu Turki karena menjadi satu-satunya negara yang terkena 2 kali tarif impor baja dan aluminium AS ([The New York Times, 2018](#)).

Presiden Trump memberlakukan tarif tambahan menyusul keputusan Turki pada Juli 2018, yang menolak membebaskan Pendeta Andrew Brunson dan adanya kekhawatiran Presiden Trump terhadap keamanan nasional AS. Pengenaan tarif baja 50% menyebabkan penurunan ekspor produk baja Turki ke Amerika Serikat.

Dampak yang terjadi setelah tarif impor baja dan aluminium AS, tahun 2018 terjadinya peningkatan pesanan substansial baja Turki ke AS dalam bulan Juni dan Juli yang diharuskan untuk mengekspor dalam jumlah banyak ditengah tarif impor tinggi. Tahun 2019, terjadi penurunan pada baja Turki yang diekspor ke AS, penurunan tersebut berlanjut ke tahun 2020 dengan harga ekspor kurang dari 230 juta US Dolar yang mengakibatkan semakin buruk ekspor produk baja Turki.

Dari dampak tersebut diatas pemerintah Turki akhirnya melakukan beberapa upaya untuk menangani permasalahan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Turki dalam menghadapi tarif impor baja dan aluminium Amerika Serikat Tahun 2018-2021.

Kerangka Konsep

1. Dispute Settlement Process (DSP)

Dispute Settlement Process atau Proses Penyelesaian Sengketa merupakan proses atau tahapan yang dapat dilalui suatu sengketa dalam sistem penyelesaian sengketa (WTO). Ada dua cara utama untuk menyelesaikan perselisihan: pertama para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama, terutama melalui negosiasi bilateral; dan kedua keputusan, termasuk laporan panel dan tindakan selanjutnya dari Dewan Banding, yang mengikat para pihak setelah adopsi DSB ([WTO, 2022](#)).

Proses penyelesaian sengketa WTO yang diadopsi oleh DSB yaitu badan keanggotaan khusus dengan wewenang untuk menyelesaikan sengketa, mengadopsi panel, dan laporan dari Badan Banding, memiliki tiga tahapan utama: antara lain, (i) konsultasi antara para pihak; (ii) keputusan panel dan, jika perlu, badan banding; dan

(iii) penegakan putusan, termasuk kemungkinan tindakan balasan jika pihak yang kalah gagal mematuhi putusan.

Konsultasi adalah fungsi utama non-yudisial/ diplomatik dari sistem penyelesaian sengketa WTO. Anggota mengajukan permintaan konsultasi kepada anggota yang menanggapi, juga harus memberitahukan permintaan kepada DSB serta Dewan dan Komite terkait yang mengawasi kesepakatan yang dipermasalahkan, kemudian mengirimkan teks pemberitahuan mereka ke Sekretariat yang tercantum pada pasal 4.4 DSU.

Panel penyelesaian sengketa beroperasi dibawah tenggat waktu yang ketat, panel diharuskan untuk menerbitkan laporan akhir kepada para pihak dalam waktu waktu 6 bulan sejak tanggal penyusunan dan tergantung kasusnya dan kerangka acuan yang disepakati. Dalam keadaan mendesak panel berusaha menerbitkan laporannya kepada para pihak dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penyusunannya tercatat pada Pasal 12.8 DSU.

Pengadu berhak untuk melakukan retaliasi yang setara dengan perjanjian internasional yang sesuai. Apabila pengadu menganggap tidak efektif untuk tetap berada di sektor yang sama sanksi dapat dikenakan di sektor yang berbeda dibawah kesepakatan yang sama Pasal 22.3(b) DSU. Jika pengadu menganggap tidak efektif untuk tetap berada dalam perjanjian yang sama maka dapat mengambil sanksi berdasarkan perjanjian lain Pasal 22.3(c) DSU.

2. Konsep Retaliasi

Retaliasi atau tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa (Freddy Joseph Pelawi, 2007).

DSB (Badan Penyelesaian Sengketa) WTO berwenang untuk menyelesaikan sengketa dagang antara negara-negara anggota yang bersengketa. Prosedur penyelesaian sengketa WTO memiliki empat tahapan, yaitu konsultasi, prosedur panel, prosedur pengaduan dan implementasi. Masalahnya kemudian pada tahap implementasi keputusan. Sulit untuk menegakkan keputusan DSB ketika negara yang menuntut adalah negara berkembang, sedangkan negara yang melanggar adalah negara maju. Oleh karena itu, DSB WTO mengembangkan mekanisme retaliasi sebagai sarana untuk menekan pelanggar agar mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan DSB.

Mekanisme pembalasan WTO ini menerapkan instrumen sanksi, yang memberikan hak kepada negara penuntut untuk melanggar konsesi yang ditentukan dalam Perjanjian WTO kepada negara yang melanggar. Retaliasi termasuk dalam tahap keempat dari penyelesaian sengketa ini, yaitu. fase implementasi. Setelah panel WTO dan *Appellate Body* menyelesaikan sengketa, negara yang melanggar diperintahkan untuk memperbaiki atau mengubah pelanggaran prinsip-prinsip WTO.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 dari *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang mendeskripsikan retaliasi, secara sederhana retaliasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. *Parallel Retaliation*: negara penuntut harus melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor perdagangan yang sama di mana pelanggaran terjadi. Retaliasi jenis ini tidak terbatas menaikkan tarif bagi komoditas sejenis, tetapi juga bisa dalam bentuk meminta ganti rugi dengan sejumlah uang yang setara dengan jumlah kerugian.

- b. *Cross-sector Retaliation*: Negara penuntut dapat melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor berbeda di bawah perjanjian yang sama, jika retaliasi dalam sektor yang sama terbukti tidak efektif.
- c. *Cross-Agreement Retaliation*: Jika situasi dianggap cukup serius dan retaliasi beda sektor dianggap tidak efektif, maka negara penuntut dapat melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam perjanjian perdagangan yang berbeda (Bown, C.P, 2009).

Cross retaliation sering disebut sebagai cara lain bagi negara berkembang yang lebih kecil untuk menggunakan pembalasan WTO sebagai secara lebih efektif sebagai alat untuk mendorong kepatuhan oleh anggota WTO yang lebih besar. Sedangkan sanksi dibentuk sebagai pembatasan perdagangan yang dapat membahayakan perekonomian seseorang (terutama jika sanksi dikenakan pada input), tidak membayar royalti kepada paten asing pemegang atau penangguhan hak intelektual warga negara di negara yang melanggar dapat meningkatkan kesejahteraan dalam sanksi ekonomi (setidaknya dalam jangka pendek) dan memberikan tekanan politik yang besar di negara-negara yang melanggar (Bown, C.P, & Joost Pauwelyn, 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan tentang bagaimana upaya Turki dalam menghadapi tarif impor baja dan aluminium Amerika Serikat tahun 2018-2021. Data penelitian ini menggunakan gabungan data primer yaitu data dari WTO report dan data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada yaitu diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan sumber internet, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Hubungan Turki dengan Amerika Serikat

Hubungan antara Turki dengan Amerika Serikat telah terjalin sejak tahun 1927. Kedua negara saling meningkatkan hubungan diplomatik dengan menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, politik dan bidang pertahanan dan keamanan. Hubungan ini semakin erat setelah Turki berhasil bergabung menjadi anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada tahun 1952 dan menjadi salah satu mitra strategis bagi AS.

1. Hubungan Turki dan AS di Bidang Ekonomi

Hubungan Turki dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi dimulai dengan kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman pada 29 Maret 1980 oleh Menteri Luar Negeri AS, George Shultz dan Menteri Luar Negeri Turki, Vahit Halefoğlu. Nota Kesepahaman dari Pejanjian Kerjasama Ekonomi dan Pertahanan (DECA) yang isinya menjelaskan tentang kesepakatan untuk menstabilkan ekonomi dan memperkuat pertahanan.

Kejasama ekonomi kemudian dilanjutkan dalam Perjanjian Kerangka Kerja Investasi dan Perdagangan Bilateral (TIFA), yang ditandatangani tahun 1999. Kedua negara merupakan mitra dagang yang saling mengembangkan dan memperluas volume perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral sangat membantu ekonomi kedua negara terutama pada ekspor dan impor dan investasi internasional.

Memasuki tahun 2009, bentuk kerjasama ekonomi yang pernah dilakukan oleh Turki dan AS yaitu Kerangka Kerjasama Ekonomi dan Komersial Strategis (FSECC) pada tahun 2009 oleh Presiden Turki, Abdullah Gül dan Presiden AS, Barack Obama.

2. Hubungan Turki dan AS di Bidang Politik

Hubungan politik Turki dengan AS berjalan dengan sangat baik, yang dibuktikan dari kesediaan Turki menerima Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Turki. Pangkalan NATO didirikan di Wilayah Incirlik, bagian Turki Selatan pada tahun 1958 dan menjadi pangkalan udara utama AS di Turki ([Military Bases, 2022](#)).

Setelah implementasi Perjanjian Pangkalan Udara Turki-AS, hubungan politik mereka tidak selalu baik. Di tahun 2016, pada masa pemerintahan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan. Presiden Erdoğan membuat kebijakan terhadap konflik yang terjadi di wilayah Suriah. Kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengamankan perbatasan antara Turki dengan Suriah dari teroris, dan memberikan ruang bagi para pengungsi untuk dapat kembali ke daerah mereka dengan selamat.

Penerapan kebijakan tersebut dilakukan dengan tiga tahapan operasi yaitu, pertama dengan mengerahkan pasukan militer Turki untuk menjalankan Operasi Perisai Eufrat di tahun 2016-2017, kemudian Operasi Ranting Zaitun di tahun 2018 dengan tujuan memberantas organisasi teroris yang dilakukan berdasarkan hukum internasional, dan yang ketiga Operasi Mata Air Perdamaian di tahun 2019 yaitu melindungi dan mengembalikan pengungsi warga sipil Suriah kembali ke negara mereka.

Selain masalah yang berkaitan dengan perang yang terjadi di Suriah yang mengakibatkan memburuknya hubungan politik Turki dengan AS yaitu penahanan Pastor Andrew Brunson yang dilakukan oleh Turki. Andrew Brunson yang merupakan pastor AS yang telah tinggal di Turki selama 23 tahun dalam memimpin jemaat di gereja injil di Turki. Andrew Brunson menjadi tersangka setelah Erdoğan menuduh Brunson terlibat dalam upaya kudeta 2016, yang kemudian ditangkap atas tuduhan terlibat dalam organisasi teroris dan spionase politik dan militer. Setelah ditahan sekitar 2 tahun lebih Turki membebaskan Pastor Brunson pada tanggal 12 Oktober 2018.

3. Hubungan Turki dan AS dibidang Pertahanan dan Keamanan

Di tahun 2014 sampai 2018 AS merupakan pengeksport senjata terbesar ke Turki, dengan kapasitas impor yang diterima 60%. Komponen senjata yang diperoleh Turki berupa jet tempur, rudal, helikopter, tank dan kapal. Sejumlah besar perwira Turki juga telah dilatih di AS, dengan memungkinkan bahwa personel militer Turki dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan AS.

Penandatanganan MoU kesepakatan kerjasama dalam program *Joint Strike Fighter* (JSF) yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Pertahanan AS, Gordon England, dan Menteri Pertahanan Turki, Muhammad Vecdi Gönül pada tahun 2007 di Washington, dengan meluncurkan pesawat jet tempur *Lockheed Martin F-35 Lightning II*.

Di tahun 2017, Presiden AS, Donald Trump dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan menyepakati kerjasama dalam pembelian Pesawat Jet tempur F-35. Peran Turki dalam proyek F-35 yaitu menjadi salah satu dari 9 peserta program serta menjadi kontraktor perawatan mesin dalam program F-35. Sejak awal pembuatan pesawat Turki telah memesan sebanyak 120 pesawat jenis F-35A yang mampu *take-off* atau landing konvensional dengan harga total kontribusi Turki dalam pembuatan pesawat F-35 mencapai \$12 miliar.

Turki memutuskan untuk melakukan pembelian dua sistem pertahanan udara yaitu Rudal S-400 Triumph senilai \$ 2,5 miliar dengan empat baterai dari Rusia, kedua

negara kemudian menandatangani perjanjian pada 29 Desember 2017, dengan pembelian Rudal S-400 Triumph yang dipesan Turki sebanyak 100 unit.

Dengan berbagai perundingan yang dilakukan Turki dan AS mengenai pembelian S-400 Triumph. Pada tanggal 19 Juni 2018, Komite Senat AS mengesahkan undang-undang yang mencakup ketentuan untuk memblokir pembelian jet tempur Lockheed Martin F-35 atas pembelian S-400 Triumph dan kemudian menghapus Turki dari program tersebut. Penghapusan Turki dari program menyebabkan kerugian senilai \$600 juta ditambah biaya tambahan sebesar \$7 juta hingga \$9 juta per pesawat.

B. Penggandaan Tarif Impor Produk Baja dan Aluminium Amerika Serikat Terhadap Turki

AS menerapkan tarif impor produk baja dan aluminium kepada seluruh negara yang mengekspor produk baja dan aluminium ke pasar AS. Kebijakan Proteksionis tarif impor baja dan aluminium AS diberlakukan oleh Presiden Donald Trump yang aktif tanggal 23 Maret 2018. Dasar hukum diberlakukannya kebijakan ini tertuang pada *authority section 232 trade actions in 2018* dalam Undang-Undang Perluasan Perdagangan Tahun 1962.

Keputusan Trump menerapkan kebijakan dilatarbelakangi faktor internal dan eksternal. Faktor internal atau domestiknya adalah untuk melindungi produksi baja dan aluminium lokal, dengan menghidupkan kembali sektor manufaktur dan melindungi bisnis AS dari persaingan oleh perusahaan-perusahaan asing. Trump menegaskan kembali bahwa industri produk baja dan aluminium yang kuat sangat penting bagi keamanan nasional AS.

Baja dan aluminium sangat diperlukan bagi industri energi AS. Baja diperlukan untuk peralatan pengeboran saluran pipa, terminal gas alam cair dan kilang. Selain itu baja juga digunakan untuk membuat rel kereta api, jembatan, pabrik dan bangunan serta peralatan rumah tangga dan mobil.

Di pihak lain, faktor eksternal yang mendorong pemberlakuan tarif ini adalah keinginan AS dalam meningkatkan ekspornya ke pasar global, bahwa dengan pasokan baja yang dimiliki AS diekspor ke pasar global dapat terpenuhi dengan memberlakukan tarif yang tinggi sehingga pasokan ekspor tersebut tidak merugikan perusahaan. Harga produk baja domestik AS yang tinggi tidak dapat mengimbangi harga baja rendah di pasar global.

Kebutuhan baja dan aluminium bagi AS sangat penting untuk digunakan dalam komponen-komponen industri militer, aviasi, peralatan rumah tangga, infrastruktur, peralatan medis. Produksi industri militer seperti rudal, kapal selam, helikopter, pesawat jet, atau amunisi diperlukan anggaran sekitar 1.5 miliar ton setiap tahun dalam industri militer.

Sekitar 175 negara menjadi tujuan ekspor produk baja AS, 10 di antaranya merupakan eksportir terbesar produk baja AS pada 2018. Negara-negara ini dikategorikan menyumbang sekitar 94% dari ekspor baja. Jenis baja yang diekspor yaitu baja datar, baja panjang, baja pipa dan tabung, baja semi jadi, baja tahan karat.

Negara yang mengekspor produk baja ke pasar AS cukup berpengaruh bagi pasar industri AS. Eksportir produk baja dari negara-negara tersebut masuk ke pasar domestik AS, dengan presentase sekitar 20% dari keseluruhan ekspor. Sekitar 70% hingga 90% konsumsi produk baja AS yang dipasok oleh pabrik domestik.

AS mengeluarkan sebuah Proklamasi 9772, 10 Agustus 2018, isi dari proklamasi tersebut mengatakan bahwa sebagaimana yang telah diubah dalam proklamasi 9711

tanggal 22 Maret 2018, tentang menyesuaikan impor ke Amerika Serikat, produk baja yang sedang diimpor ke AS dalam jumlah dan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga mengancam dan mengganggu keamanan nasional AS, dan memutuskan untuk menyesuaikan impor produk baja dengan mengenakan tarif *ad valorem* 25%.

Ad Valorem adalah pajak yang dihitung berdasarkan persentase nilai real estat atau perusahaan dan secara resmi ditetapkan oleh negara melalui undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, *ad valorem tax* atau *smart tariff*, yang ditetapkan berdasarkan persentase dan nilai tetap dari produk. *Ad valorem* pertama kali dibuat di Amerika Serikat pada tahun 1789, yang menjelaskan adanya *ad valorem* dan pajak khusus, yang pada umumnya memiliki nilai beban yang rendah.

Impor produk Aluminium juga termasuk dalam proklamasi yang tercatat dalam Proklamasi 9710 tanggal 22 Maret 2018, tentang menyesuaikan impor produk aluminium ke Amerika Serikat. Presiden Trump memutuskan untuk menyesuaikan impor barang aluminium dengan mengenakan tarif *ad valorem* 10%. dari semua negara (*The White House, 2022*).

Amerika Serikat memberlakukan tarif impor produk baja ke hampir semua negara asal yang mengekspor dengan beberapa negara yang dikecualikan yaitu Kanada, Meksiko dan Australia dan beberapa negara yang menyetujui kuota yaitu Korea Selatan, Brasil dan Argentina. Untuk tarif impor aluminium dikecualikan Kanada, Meksiko dan Australia dan Argentina menyetujui tarif kuota (*John Brew, Frances P. Hadfield, et. Al, 2022*).

Tanggal 13 Agustus 2018, Presiden Trump menetapkan untuk mengenakan tarif *ad valorem* 50% untuk baja yang diimpor dari Turki, dan juga tambahan untuk aluminium 20%, Tercatat dalam Proklamasi 9772 10 Agustus 2018, bahwa negara yang mengekspor produk baja ke AS harus menyesuaikan tarif impor ke AS. Mekanisme penerapan tarif tambahan 25% baja dan 10% aluminium dihitung sebagaimana perhitungan tarif *ad valorem* dan dari hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan persentase tambahan (*Cornell Law School, 2023*).

Khusus untuk Turki yang mendapatkan tarif tambahan, dilatar belakangi oleh alasan politik mengenai kebijakan presiden Erdoğan yang tidak sependapat dengan Trump. Hal politis yang rentan dalam hubungan Turki dan AS seperti perbedaan pandangan dalam misi memerangi anggota teroris di Suriah, memicu ketegangan dan menimbulkan masalah yang lebih parah.

Hal politis lain yang memicu terjadinya ketegangan yaitu saat Turki menahan pastor Andrew Brunson dan enggan untuk membebaskan, dalam permasalahan tersebut kedua negara tidak menemukan titik temu dalam menyelesaikannya. AS memiliki alasan kuat mengapa harus menerapkan tarif tambahan terhadap Turki, dengan adanya permasalahan yang terjadi ketika Turki menyetujui pembelian S-400 Triumph dengan Rusia.

C. Dampak Tarif Impor Produk Baja dan Aluminium AS terhadap Turki

Beberapa dampak yang dirasakan Turki dari tarif impor produk baja dan aluminium yaitu :

a) Dampak Politik

Penerapan tarif impor produk baja dan aluminium AS memberikan dampak besar bagi hubungan politik Turki dan AS. Setelah beberapa kasus yang terjadi merubah sikap kedua negara dalam politik internasional. Turki memutuskan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Triumph milik Rusia dan dilakukan pengiriman pertama di

tanggal 25 Juli 2019, yang menambah kekecewaan Trump. Kesepakatan pembelian S-400 gelombang kedua oleh Turki masih dalam tahap pembicaraan dengan Rusia. Oleh karena itu, AS mengatakan bahwa apapun yang dibeli Turki ke negara-negara yang berlawanan dengan kebijakan AS maka akan mendapatkan sanksi.

Semakin memburuknya hubungan antara kedua negara yaitu setelah Turki menahan pastor Andrew Brunson yang menyebabkan AS memberlakukan tarif tambahan. Penahanan Pastor Brunson dilakukan tanggal 7 Oktober 2016 dan dibebaskan di tanggal 12 Oktober 2018, setelah AS menggandakan tarif. Bahwa tarif tersebut tidak mudah berakhir dan semakin memburuk dari hari ke hari. Turki menjelaskan bahwa hubungannya dengan negara AS masih kurang baik sehingga lebih baik untuk menjalin sistem internasional dengan negara barat kecuali AS.

b) Dampak Ekonomi

1. Menurunnya nilai Lira Turki

Penerapan tarif impor baja dan aluminium AS terhadap Turki juga berdampak pada penurunan nilai lira. Pada dasarnya nilai lira mengalami penurunan sejak tahun 2015 sekitar 1,3 lira terhadap 1 dolar AS, pada saat pemerintah Turki menerapkan Kebijakan Moneter oleh Bank Sentral Republik Turki (CBRT) terhadap suku bunga pasar melalui variable mikro suku bunga.

Kebijakan moneter yang tidak konvensional disusun oleh Bank Sentral Republik Turki untuk menjaga suku bunga rendah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Turki serta meningkatkan potensi ekspor dengan nilai tukar yang kompetitif.

Nilai lira menurun diperburuk akibat dari penerapan tarif impor produk baja dan aluminium tambahan, mengakibatkan lira turun dibawah angka rata-rata. Hal tersebut dapat diketahui dari krisisnya nilai tukar lira Turki terhadap mata uang dolar AS. Lira turun sekitar 20% mengikuti jadwal penurunan harian dari 7 lira per 1 dolar AS pada 13 Agustus 2018 menjadi 5.8 lira 17 Agustus 2018.

2. Dampak tarif terhadap Inflasi

Menurunnya nilai lira terhadap dolar AS memicu inflasi yang tercatat sekitar 24,52% pada bulan September 2018. Naiknya inflasi berimbas pada kenaikan harga, pengangguran, dan juga tagihan pinjaman.

Angka persenan yang naik pada tahun 2018, sekitar 16,33%, angka tersebut naik perlahan pada tahun sebelumnya yaitu sekitar 11,14%. Kemudian di tahun 2019 dan 2020 turun hingga mencapai 12,28%, lalu kembali naik di tahun 2021 sekitar 16,98%. Grafik tingkat inflasi rata-rata Turki dari tahun ke tahun berjalan tidak stabil.

3. Dampak terhadap ekspor Produk Baja dan Aluminium Turki ke AS

Ekspor produk baja ke AS mengalami penurunan dari tahun ke tahun setelah AS memberlakukan tarif produk baja dan aluminium. Akibatnya baja yang dieskpor ke AS semakin menurun dan mengalami kerugian bagi baja Turki.

Sebelum Trump memutuskan akan menerapkan tarif impor produk baja dan aluminium, ekspor produk baja Turki ke AS pada 2018 senilai \$900 juta. Namun berselang satu tahun pada 2019 ekspor baja Turki mengalami penurunan senilai \$160 juta yang turun sekitar 70% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut terbilang cukup rendah yang dimana dalam setahun Turki mengalami kerugian yang sangat besar. Masuk ke tahun 2020 ekspor baja Turki ke AS mengalami peningkatan sekitar \$290 juta.

D. Upaya Turki

1. Pengajuan Laporan Tarif Impor

Pasca dijatuhi tarif impor produk baja dan aluminium oleh Amerika Serikat atas beberapa masalah yang terjadi antara Turki dengan AS. Turki melakukan tahapan pertama dari proses penyelesaian sengketa dalam WTO. Di tanggal 21 Mei 2018, Delegasi Turki mengajukan pemberitahuan berdasarkan pasal 12.5 Perjanjian Pengamanan WTO tentang keputusan untuk menanggihkan konsesi dan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian tersebut. Delegasi Turki mengajukan konsultasi bahwa tindakan yang dilakukan AS tidak konsisten dengan sejumlah ketentuan Perjanjian WTO tentang Pengamanan dan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan GATT 1947.

Di bawah aturan WTO, para pihak yang menyampaikan keluhannya atas tarif produk baja dan aluminium AS diberikan waktu konsultasi selama 60 hari untuk menyelesaikan perselisihan. Jika solusi tidak dapat ditemukan, maka masalah dapat dipindahkan ke Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO. Pernyataan delegasi Turki dibuat oleh Kementerian Perdagangan yang disebutkan bahwa langkah-langkah yang diperlukan telah diambil untuk melindungi hak-hak eksportir Turki dalam pernyataan WTO.

1. Tahapan Konsultasi

Pada tanggal 15 Agustus 2018, delegasi Turki mengajukan permintaan kepada WTO agar Dewan Umum WTO membuka kesempatan bagi Turki dan AS untuk konsultasi tentang bea tarif impor baja dan aluminium. Selain itu, delegasi Turki juga meminta dibentuknya panel DSB untuk menyelidiki masalah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Turki melalui Menteri Perdagangan Rusnar Pekcan. Pekcan mengatakan bahwa undangan Turki yang ditujukan ke AS melalui WTO telah sampai tanggal 16 Agustus 2018. Menurut Turki konsultasi tersebut penting untuk dilakukan untuk menyelidiki tindakan AS masuk dalam pelanggaran atau tidak.

Pada tanggal 24 Agustus 2018, AS bersedia ikut dalam konsultasi dengan Turki, tanpa mengurangi pandangan AS bahwa tindakan yang diambil oleh AS menyangkut dengan keamanan nasional yang tidak dapat ditinjau atau diselesaikan dengan prosedur penyelesaian sengketa WTO dan tidak tunduk pada ketentuan konsultasi pengamanan. Delegasi AS juga mengajukan permintaan kepada Ketua DSB untuk mengedarkan kepada anggota WTO untuk hadir sebagai negara Hak Pihak Ketiga dalam konsultasi, dan sekitar 31 negara bersedia mengajukan permintaan sebagai Hak Pihak Ketiga (WTO, 2018).

Dengan disetujuinya delegasi AS untuk melakukan konsultasi, maka Ketua DSB segera menyusun jadwal agar konsultasi dilakukan. Pada tanggal 10 Oktober 2018, konsultasi diadakan dan diperpanjang 30 hari sejak pengajuan permintaan dan harus diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak pengajuan permintaan konsultasi (WTO, 2018).

2. Tahapan Pembentukan dan komposisi panel

Meskipun AS menerima untuk mengadakan konsultasi, hasil dari konsultasi antara Turki dan AS tersebut gagal. Sehingga di tanggal 18 Oktober 2018, delegasi Turki mengajukan permohonan ke DSB untuk membentuk panel. Turki mengajukan permintaan bahwa tindakan tarif impor baja dan aluminium tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian WTO, Perjanjian Pengamanan dan juga Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan GATT 1994 dalam dokumen WT/DS54/15 sebagai berikut: (WTO, 2018).

1. Pasal 2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 4.2; 5.1; 7; 8.1; 9.1; 11.1(b); 12.1; 12.2; dan 12.3 tentang tindakan pengamanan darurat dalam arti Perjanjian Pengamanan. (Lampiran 1)
2. Pasal I:1; II:1(a); II:1(b); X:3(a); XI:1; XIII:1; XIX:1(a); dan XIX:2 GATT 1994; tentang langkah-langkah yang tidak konsisten dengan kewajiban AS berdasarkan beberapa ketentuan GATT 1994 dan Perjanjian Pengamanan. (Lampiran 1)
3. Pasal XVI:4 Perjanjian WTO. (Lampiran 1)

Pada tanggal 29 Oktober 2018, WTO mengundang delegasi Turki dan AS untuk melakukan pertemuan guna untuk membentuk panel. Namun, AS memblokir atau menolak permintaan pembentukan panel dengan mengatakan tarif yang dikenakan berdasarkan pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan yang utama dan peran baja dan aluminium dalam pertahanan nasional AS.

Delegasi Turki kembali mengajukan permintaan untuk dibentuknya panel sepenuhnya ke DSB. Turki mengatakan bahwa panel tidak harus dibentuk jika AS mau bekerjasama untuk menyelesaikan perselisihan. Sehingga pada tanggal 21 November 2018, DSB membentuk panel atas permintaan Turki sesuai dalam dokumen WT/DS54/15, sesuai dengan pasal 6 Kesepahaman tentang Aturan dan Prosedur yang mengatur Penyelesaian Sengketa (DSU).

Kemudian dilanjutkan tanggal 7 Januari 2019, delegasi Turki meminta kepada Roberto Carvalho de Azevêdo (Direktur Jenderal WTO) untuk membentuk panel sesuai dengan pasal 8.7 DSU. Pada 25 Januari 2019, Dirjen berhasil memproses dan menyusun panel sesuai dengan langkah-langkah yang telah disetujui.

Delegasi AS mengatakan bahwa AS menyesalkan bahwa Turki telah bergerak maju dengan permintaan kedua untuk membentuk panel. Seperti yang telah dijelaskan AS dalam pernyataannya yang dibuat pada pertemuan DSB terakhir pada 29 Oktober 2018 yang membahas permintaan panel Turki, karena AS telah menerapkan pasal XXI GATT 1994, tidak ada dasar bagi panel untuk meninjau meninjau klaim Turki atas ketidakkonsistenan WTO. Delegasi Turki telah meminta agar satu panel dibentuk berdasarkan Pasal 9.1 DSU untuk memeriksa berbagai hal dalam agenda pertemuan saat ini.

3. Tahapan Penegakan Putusan

Turki memutuskan untuk menerapkan tindakan balasan sebelum adanya putusan dari laporan panel. Disebabkan AS gagal dalam mematuhi aturan yang terdapat dalam WTO. Sehingga dalam proses pembentukan panel, retaliasi telah diterapkan ke AS.

Pada tanggal 4 September 2019, Ketua Panel menginformasikan kepada DSB bahwa panel diharapkan untuk menerbitkan laporan akhirnya kepada pihak paling lambat tahun 2020. Pada 30 Juni 2022, Ketua Panel menginformasikan ke DSB bahwa panel diharapkan mengeluarkan laporan akhirnya tidak lebih awal dari kuartal terakhir tahun 2022. Pada 09 Desember 2022, laporan panel diedarkan ke anggota WTO ([WTO, 2018](#)).

Tanggal 26 Januari 2023, delegasi AS menginformasikan DSB tentang keputusannya untuk mengajukan banding ke Badan Banding atas masalah hukum dan interpretasi hukum tertentu dalam laporan panel. Pada 20 Februari 2023, Turki mengirimkan komunikasi ke DSB yang mengungkapkan pandangannya bahwa banding AS belum diajukan dengan cara yang sah secara hukum.

Delegasi Turki berpendapat bahwa banding AS tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam aturan 20(2) prosedur kerja untuk peninjauan banding, karena tidak memuat referensi apa pun pada paragraf laporan panel yang berisi kesalahan yang

dituduhkan oleh AS; dan AS belum mengajukan pengajuan banding sesuai dengan aturan 21(1) prosedur kerja.

Analisis hasil dari pengajuan tarif impor baja dan aluminium ke WTO, delegasi Turki memutuskan mengajukan keluhan ke WTO atas tarif baja dan aluminium dan tarif tambahan AS. Turki menyadari bahwa tarif tambahan berdampak buruk bagi ekonomi terkhusus ekspor baja dan aluminium Turki. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak yang lebih besar, Turki mengambil langkah tersebut untuk mengurangi kerugian.

Keputusan Turki dalam mengajukan keluhan ke WTO mendapat respon yang baik sehingga konsultasi antara Turki dengan AS dapat dilakukan. Kedua negara mengikuti proses yang diatur oleh WTO meskipun dengan beberapa kali meminta ke AS untuk ikut dalam konsultasi yang kemudian proses tersebut berhasil dengan dibentuknya panel dan penegakan putusan yaitu tindakan balasan atau retaliasi.

2. Cross-Sector Retaliation

Selain mengajukan tuntutan ke WTO, Turki melakukan upaya untuk mengatasi tarif impor produk baja dan aluminium Amerika Serikat dengan menggunakan konsep retaliasi atau tindakan balasan. Tindakan balasan yang dilakukan oleh Turki berupa tarif bea impor produk dari AS, selain menerapkan tarif Turki juga memperkuat ekonomi selama tarif berjalan.

Pada tanggal 21 Juni 2018, pemerintah Turki menerapkan tindakan balasan terhadap AS. Turki mengambil langkah dalam menerapkan tindakan balasan sesuai dengan total pajak yang sama dengan 22 produk AS senilai \$266,5 juta.

Dari 22 produk yang dikenakan tarif, 3 diantaranya diberi pajak tertinggi seperti alkohol yang sebelumnya 40% menjadi 140%, mobil sebelumnya 35% menjadi 120%, tembakau sebelumnya 25% menjadi 60%. Beberapa dari tarif bea impor produk yang dikenakan pada AS meliputi produk pertanian dan makanan.

Alasan Turki menargetkan untuk menerapkan tarif bea impor produk pertanian AS karena AS merupakan pengekspor makanan dan produk pertanian terbesar. Selain itu komoditas pertanian AS lebih sering diganti oleh impor tertentu, sehingga membatasi impor dari satu negara tetapi tidak membatasi negara lain untuk mengimpor produk tersebut. Beberapa makanan dan produk pertanian diproduksi terutama di wilayah tertentu di AS.

Ekspor alkohol AS ke Turki menurun pada tahun 2017 karena kurangnya minat dari warga Turki sebagai pembeli yang memprotes perselisihan dengan AS yang memperparah krisis ekonomi Turki. Di tahun 2018 dan 2019 minat dari ekspor alkohol meningkat dan di tahun 2020 seketika minat dari alkohol meningkat drastis dari \$18 juta ke \$37 juta. Namun di tahun 2021 kembali mengalami penurunan sekitar \$24,27 juta.

Alkohol yang diimpor Turki dari AS tahun 2018 mengalami peningkatan yang setara dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2019 impor alkohol turun menjadi \$20 juta, namun di tahun 2020 meningkat pesat hingga mencapai \$58 juta. Tingkat impor yang sangat tinggi dari 10 tahun terakhir. Di tahun 2021 mengalami penurunan sekitar \$35,45 juta.

Tarif tinggi akan dikenakan pada mobil Ford, Jeep, dan BMW, merek mobil dari Jerman akan terpengaruh karena kebanyakan produksi model BMW dibuat di AS. Hampir setengah dari kendaraan mobil yang dijual di AS merupakan produk impor.

Pajak tambahan untuk kendaraan dengan kapasitas mesin 1,6 liter telah dinaikkan dari 60% menjadi 80% menggunakan keputusan presiden Turki. Model mobil dengan

kapasitas lebih dari 2.000 sentimeter kubik dengan pajak sebelumnya 100% menjadi 130%, sementara untuk mobil dengan segmen tinggi akan dari 160% menjadi 220% dan berlaku bagi mobil yang diimpor.

Ekspor tembakau Turki ke AS ditahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2018 masih mencapai tingkat ekspor tertinggi hingga di tahun 2019 turun sekitar \$82 juta. Di tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sekitar \$141,28 juta.

Selain pajak tambahan terhadap tiga impor teratas, produk pertanian juga merupakan impor teratas AS dari Turki. Dampak yang dirasakan AS setelah terkena pajak tambahan atas produk pertanian yaitu ekspor pertanian AS ke negara-negara yang menerapkan tarif akan berkurang. Sementara kemampuan produsen AS untuk menjual produk pertanian mereka ke negara mitra dagang yang tidak mengenakan tarif, menyebabkan penurunan perdagangan secara keseluruhan.

Tarif baja dan aluminium yang diterapkan oleh AS ke Turki akhirnya dikurangi tarifnya dari 50% menjadi 25% untuk baja pada tanggal 17 Mei 2019. (Humeysa Pamuk & Eric Beech, 2019) Keputusan tersebut diambil oleh AS setelah retaliasi terhadap produk pertanian dan makanan yang diterapkan Turki berdampak buruk bagi produk pertanian dan makanan AS.

Setelah AS mengurangi tarif tambahan atas baja Turki, Presiden Erdoğan memutuskan untuk mengurangi 50% setelah AS menurunkan 50% tarif tambahan terhadap impor produk baja Turki. Setelah Turki menerapkan tarif tambahan terhadap 22 produk AS, ditanggal 22 Mei 2019 dengan mengurangi 50% produk pertanian dari tarif tambahan. Keputusan tersebut datang pada hari yang sama dengan penghentian AS atas perlakuan perdagangan preferensial Turki yang memungkinkan beberapa ekspor masuk ke negara itu dengan bebas bea.

Dalam konsep *cross sector retaliation* dijelaskan, suatu negara dapat memberikan tindakan balasan dengan melakukan retaliasi disektor berbeda dibawah perjanjian yang sama. Presiden Erdoğan mendukung Turki untuk bertahan dalam menghadapi tarif impor produk baja dan aluminium dengan pembalasan silang pada sektor pertanian AS. Dengan menerapkan pembalasan silang dapat menguntungkan dan juga tidak bagi negara berkembang seperti Turki, yang pertama bahwa insentif ekonomi dari pembalasan silang tidak sedikit menguntungkan bagi negara berkembang. Kedua, bahwa dari kasus-kasus sebelumnya belum berhasil diikuti oleh negara-negara berkembang.

Presentase dari pertumbuhan PDB Turki dari tahun 2019 sampai sekarang mengalami kenaikan, pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami penurunan sekitar -10,80% yang terbilang cukup jauh. PDB mulai kembali mengalami peningkatan di kuartal ketiga sekitar 16,40%. Pada tahun selanjutnya juga mencapai kenaikan.

Tingkat pertumbuhan PDB Turki di tahun 2020 naik sangat tinggi setelah beberapa tahun mengalami penyusutan. Pertumbuhan PDB Turki kembali mengalami peningkatan yang didorong dengan adanya permintaan yang kuat, kontribusi manufaktur dan ekspor. Peningkatan tersebut berhasil mendorong ekonomi untuk tumbuh 16% di tahun 2020.

Upaya lain yang dilakukan oleh Erdoğan untuk memperbaiki ekonomi Turki yaitu memperluas pasar di negara Eropa yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup tinggi seperti Jerman, Rusia dan juga negara Asia seperti Tiongkok.

Adapun langkah-langkah yang telah dibuat oleh Erdoğan untuk membangun kembali perekonomian Turki:

1. Mendorong perubahan pasar dengan membangun kemitraan dan aliansi baru dengan Rusia dan Tiongkok.
2. Warga negara Turki tidak boleh menukarkan tabungan Lira ke mata uang asing.
3. Bagi eksportir yang kesulitan mempresentasikan harga karena fluktuasi nilai tukar maka, panduan kurs ke depan akan diberikan melalui bank sentral.
4. Penghentian (pengurangan) pembayaran dividen dari perusahaan juga akan dikurangi menjadi 10% .
5. Rasio subsidi negara terhadap rasio pensiun swasta akan meningkat signifikan dari 5% menjadi 30% .

Bea masuk sekaligus bea tambahan Turki terhadap produk pertanian dan makanan AS mendapat respon dari Presiden Trump karena bea masuk tersebut merugikan pertanian AS. Sehingga AS mengajukan keluhan dan meminta ke WTO untuk dilakukan konsultasi dengan Turki.

Tanggal 16 Juli 2018, AS meminta konsultasi dengan Turki yang sesuai dengan pasal 4 kesepakatan tentang aturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa dan Pasal XXIII Perjanjian Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 1994 (GATT). Tanggal 29 Agustus 2018, AS dan Turki mengadakan konsultasi dengan isi permintaan untuk mengubah bea tambahan untuk meningkatkan tarif bea 21 dari 22 pos tarif yang dipengaruhi oleh bea tambahan.

AS mengatakan bahwa tindakan bea tambahan dapat meniadakan atau merusak manfaat yang diperoleh AS secara langsung atau tidak langsung berdasarkan GATT 1994. Pada tanggal 20 Desember 2018, AS meminta WTO agar dibentuk panel dan di tanggal 11 Januari 2019, AS mengikuti pertemuan dengan DSB guna membahas penundaan pembentukan panel. Sehingga DSB kembali melakukan pertemuan pada tanggal 28 Januari 2019, untuk membentuk panel sesuai dengan isi dari konsultasi.

Pada tanggal 18 Februari 2019, AS meminta kepada Direktur Jenderal untuk menyusun panel. Tanggal 28 Februari 2019, Dirjen menyusun panel dan akan memberitahukan laporan akhir yang akan diterbitkan kepada para pihak yang bersangkutan kuartal kedua tahun 2020. Hingga pada tanggal 23 Januari 2023, ketua panel memberitahukan kepada DSB bahwa laporan akhir akan diterbitkan kepada para pihak di pertengahan tahun 2023.

Tindakan balasan Turki terhadap AS di industri pertanian dan makanan berdampak pada petani di beberapa negara bagian AS yang diperkirakan mengalami masalah kerugian ekspor yang terkait dengan konflik perdagangan. Tarif balasan Turki terhadap AS menyebabkan penurunan yang sangat signifikan dalam ekspor pertanian AS ke Turki. Secara nasional, kerugian ekspor pertanian AS diakibatkan tarif balasan berjumlah lebih dari \$27 miliar selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 ([U.S. Department of Agriculture, 2022](#)) .

Tarif balasan Turki mengurangi arus perdagangan lini produk bulanan AS yang dengan rata-rata -48%. Kerugian ekspor AS ke Turki di sektor minuman dan tembakau kemungkinan besar disebabkan oleh bea masuk yang sangat tinggi untuk minuman beralkohol tertentu. Tarif tambahan Turki berkisar dari 10% untuk kacang, 25% untuk beras, hingga 70% untuk minuman beralkohol tertentu termasuk bourbon, vodka dan gin.

Kenaikan harga impor akibat tarif yang tinggi mengurangi jumlah pembelian produk yang terpengaruh karena importir beralih ke pemasok lain atau produk pengganti di pasar domestik. Dampak tarif tinggi terhadap perdagangan bergantung pada importir asing sebagai alternatif. Penurunan ekspor pada produk pertanian dan

makanan AS memengaruhi ekonomi secara keseluruhan, karena merupakan faktor pendukung seperti pertanian, koperasi pasar, gudang dan fasilitas pengolahan, dan jaringan transportasi apabila pekerja kehilangan pendapatan.

Akibat tarif balasan Turki untuk komoditi pertanian AS seperti, biji-bijian, kacang-kacangan, beras, daun tembakau dan limbah tembakau, kayu bakar, dan berbagai macam kayu lainnya, menyebabkan penurunan ekspor dari AS ke Turki. Hal ini berimbas pada petani-petani AS yang mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah AS mengajukan keluhan ke WTO untuk berkonsultasi dengan Turki untuk mendapatkan pengurangan atas tarif balasan di produk pertanian dan makanan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, industri baja dan aluminium AS berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap keuangan negara maka untuk menjaga itu negara-negara pengekspor produk baja dan aluminium ke AS diberikan tarif bea masuk. AS menerapkan tarif tambahan dua kali lebih besar ke Turki yang disebabkan atas krisis diplomatik yang terjadi dan merenggangnya hubungan bilateral Turki dan AS.

Dampak yang terjadi dari tarif impor produk baja dan aluminium yang dirasakan Turki yaitu, perekonomian Turki mengalami krisis dan Lira Turki turun sekitar 40% di tahun 2018. Turki termasuk dalam negara dengan *emerging market*, yaitu negara yang masih terikat pada kebijakan yang diambil oleh AS dan Tiongkok.

Atas tarif yang diterima, Turki melakukan upaya dengan mengajukan permintaan konsultasi proses penyelesaian sengketa DSB di WTO agar ditindak lanjuti mengenai tarif impor produk baja dan aluminium. Selanjutnya, Turki memberikan respon dan tindakan balasan berupa tarif bea impor terhadap 22 produk AS. selain itu Turki juga memperkuat perekonomiannya untuk menghadapi dampak terbesar dari tarif impor produk baja dan aluminium AS.

Hasil upaya yang diterapkan Turki mampu mengembalikan nilai ekspor baja dan aluminium Turki ke AS. Meskipun tarif baja dan aluminium AS yang diterapkan ke Turki masih berlaku. Hal tersebut menjadi langkah Turki untuk dapat kembali memperbaiki ekonomi pasca tarif baja dan aluminium AS.

Daftar Pustaka

- AISI, "The Economic Impact of the American Iron and Steel Industry", terdapat di, <https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/10/Econ-Impact-Study-Executive-Summary.pdf>.
- Bown, C.P, dan Joost Pauwelyn, *The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, Cambridge University Press, United States of America, 2010, hal. 14
- Bown, C.P, *Self-Enforcing Trade: Developing Countries and WTO Dispute Settlement*, Brooking Institution Press, Washington D.C. 2009, pp. 47-48
- Congressional Research Service, "Section 232 Investigations: Overview and Issues for Congress", terdapat di, <https://fas.org/sgp/crs/misc/R45249.pdf>.
- Cornell Law School, "Ad Valorem Tax", terdapat di, https://www.law.cornell.edu/wex/ad_valorem_tax. Diakses tanggal 13 April 2023.
- EveryCRSReport, "Retaliatory Tariffs and U.S. Agriculture", tersedia di, <https://www.everycrsreport.com/reports/R45903.html>

- Freddy Joseph Pelawi, Retaliasi Dalam Kerangka WTO, KPI, Buletin 46, 2007, hal. 1
- Humeyra Pamuk, Eric Beech, “*U.S. Terminates Turkey’s preferential trade agreement, reduces tariffs on steel*”, terdapat di, <https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-turkey-idUSKCN1SN01Z>.
- Hurriyet, “*Türkiye rasmen F-35 sava uçağının üretim ortağı*”, terdapat di, <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkiye-rasmen-f-35-savas-ucaginin-uretim-ortagi-5846734>. Diakses tanggal 22 April 2022.
- John Brew, Frances P. Hadfield, dkk, “*Latest US. Trade Actions /Tariffs and Other Countries Retaliatory Measures-Update 08 November 2021*”, terdapat, <https://www.cmtradelaw.com/2018/10/latest-u-s-trade-actions-tariffs-and-other-countries-retaliatory-measures/#more-2754>. Diakses tanggal 22 Januari 2022.
- Military Bases, “*Incirlik Air Base in Incirlik, Turkey*”, terdapat di, <https://militarybases.com/overseas/turkey/incirlik/>. Diakses tanggal 18 April 2022.
- Tankerslay, Jim, et al. The New York Times, “*Trumps Hits Turkey When It’s Down, Doubling Tariffs*”, terdapat di, <https://www.nytimes.com/2018/08/10/us/politics/trump-turkey-tariffs-currency.html>. Diakses tanggal 17 Desember 2019.
- The White House, “*A Proclamation on Adjusting Imports of Aluminum into the United States*”, terdapat di, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/27/a-proclamation-on-adjusting-imports-of-aluminum-into-the-united-states-2/#:~:text=In%20Proclamation%209704%20of%20March,national%20security%20of%20the%20United>. Diakses tanggal 04 Februari 2022.
- Tika Marzaman, “Retaliasi silang bagi Negara Berkembang dalam *Dispute Settlement Mechanism*”, terdapat di, <https://cwts.ugm.ac.id/en/2013/03/18/retaliasi-silang-bagi-negara-berkembang-dalam-dispute-settlement-mechanism-wto/>.
- U.S. Department of Agriculture, “*The Economic Impact of Retaliatory Tariffs on U.S. Agriculture*”, tersedia di, <https://www.wita.org/atp-research/usda-retaliatory-tariff-impacts/>.
- U.S. Department of Commerce, “*Secretary Ross Realeses Steel and Aluminum 232 Reports in with White House*”, terdapat di, *Coordination* <https://2017-2021.commerce.gov/news/press-releases/2018/02/secretary-ross-releases-steel-and-aluminum-232-reports-coordination.html>
- WTO, “*Dispute Settlement Body-minutes of meeting-Held in the Centre Wiliam Rappard on 21 November 2018*”, terdapat di, [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/dsb/m/*\)%20and%20\(@Title=%20\(21%20november%202018\)\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/dsb/m/*)%20and%20(@Title=%20(21%20november%202018))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).
- WTO, “*Panels established to review US steel and aluminium tariffs, countermeasures on US imports*”, terdapat di, https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dsb_19nov18_e.htm.
- WTO, “*United States-Certain Measures on Steel and Aluminium Products*”, terdapat di, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds564_e.htm.
- WTO, 2022, “*The Process-Stages in a typical WTO Disputes Settlement Case*”, terdapat di, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s1p1_e.htm.